

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Tujuan dari sebuah pembangunan adalah menciptakan kemakmuran dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut Pemerintahan Republik Indonesia harus bekerja ekstra keras dalam melaksanakan tugasnya. Pelaksanaan otonomi daerah yang dimulai tahun 2001 menuntut daerah untuk berupaya meningkatkan sumber yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tujuan dari otonomi daerah adalah meningkatkan daya guna hasil guna penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tolak ukur yang penting untuk menentukan tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah secara nyata dan bertanggung jawab. Pelaksanaan otonomi daerah dijiwai oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yaitu tentang Pemerintah Daerah. Otonomi daerah membawa dampak positif bagi daerah yang memiliki potensi sumber daya alam, tetapi tidak demikian dengan daerah yang miskin sumber daya alamnya, yang merupakan salah satu masalah yang dihadapi pemerintah daerah kabupaten/kota pada umumnya adalah terbatasnya dana yang berasal dari daerah sendiri (PAD), sehingga proses otonomi daerah belum bisa berjalan sebagaimana mestinya.

Berbicara terkait keberhasilan perekonomian yang dicapai oleh suatu Negara, hal ini dapat dilihat dari keadaan ekonomi masing-masing daerah yang terdiri dari beberapa kota atau kabupaten. Jika melihat kondisi perekonomian yang harus diketahui terlebih dahulu adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Karena di dalam PDRB memuat secara keseluruhan aktifitas ekonomi. Ketika PDRB mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, maka dapat dikatakan bahwa suatu daerah berhasil dalam mengatur dan mengelola jalannya perekonomian . PDRB sendiri tidak lepas dari 3 pendekatan yaitu produksi, pendapatan, dan pengeluaran.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan fungsi dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), adanya peningkatan PDRB merupakan kesempatan emas bagi pemerintah daerah untuk menaikkan penerimaan PAD. Dalam perhitungan PDRB digunakan 2 macam harga, yaitu PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga berlaku setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan dihitung dengan menggunakan harga pada satu tahun tertentu.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat diartikan sebagai nilai barang-barang dan jasa –jasa yang diproduksi didalam Negara tersebut. Jadi ini dapat diartikan bahwa PDRB adalah nilai barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksi dalam suatu daerah tertentu dalam satu tahun tersebut (Sukirno,2004:33)

Belanja langsung merupakan salah satu instrumen utama kebijakan dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Oleh karena itu Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) harus berupaya secara nyata dan terstruktur untuk menghasilkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang betul-betul mencerminkan kebutuhan riil masyarakat di daerah sesuai dengan potensi masing-masing. Untuk melihat apakah daerah telah siap secara finansial untuk menyongsong otonomi daerah, antara lain adalah dengan melihat apakah sumber-sumber penerimaan APBD nya mampu menutup anggaran belanja daerah yang bersangkutan. Di samping itu anggaran belanja pembangunan yang dialokasikan pada program proyek yang langsung menyentuh sektor ekonomi produktif masyarakat akan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

Dengan adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu daerah diharapkan mampu memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi daerah. Sejalan dengan hal tersebut maka keberhasilan pembangunan perkonomian dari suatu wilayah dan kinerjanya dapat diamati melalui beberapa indikator makro. Indikator makro tersebut dapat dianalisis melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dapat didefinisikan menurut Badan Pusat Statistik sebagai penjumlahan nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh unit kegiatan ekonomi yang beroperasi di wilayah/daerah tersebut dalam periode tertentu. Jadi, PDRB adalah nilai tambah yang pengukurannya berdasarkan adanya aktivitas ekonomi di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi daerah berkaitan erat dengan peningkatan produksi barang dan jasa, yang diukur dengan

besaran dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan juga sebagai indikator untuk mengetahui kondisi ekonomi suatu daerah dalam suatu periode tertentu. Data PDRB juga dapat menggambarkan kemampuan daerah mengelola sumberdaya pembangunan yang dimilikinya, oleh karena itu besaran PDRB setiap daerah bervariasi sesuai dengan potensi yang dimiliki dan faktor produksi masing-masing daerah.

Semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pula kemampuan orang untuk membayar berbagai pungutan yang ditetapkan pemerintah. Dalam konsep makro dapat dianalogikan bahwa semakin besar PDRB yang diperoleh maka akan semakin besar pula potensi penerimaan daerah. Jadi dengan adanya peningkatan PDRB maka hal ini mengindikasikan akan mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Saragih, 2003). Pendapat ini sejalan dengan Halim (2000), bahwa Pendapatan Asli Daerah dipengaruhi oleh Produk Domestik Regional Bruto.

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan murni daerah yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli yang sah (meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah. Semua pendapatan daerah itu mempunyai peranan penting dalam keuangan daerah yang merupakan salah satu tolak ukur

didalam pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab secara proporsional.

Menurut Kuncoro, (2004:334-358) dalam penyelenggaraan otonomi daerah nantinya dikhawatirkan banyak daerah kabupaten/kota yang tidak mampu membiayai kebutuhan daerahnya. Hal ini dapat dilihat dari kondisi keuangan daerah yang ada selama ini di mana porsi antara PAD dengan bantuan pusat sangat menjolok sekali bahwa lebih separuh dari jumlah kabupaten/kota di Indonesia memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat minim dalam membelanjai kebutuhan anggaran daerahnya, yaitu di bawah 15% dari total anggaran secara keseluruhan.

Pendapatan Asli Daerah sangat penting dalam pelaksanaan pembangunan karena dana ini adalah milik pemerintah daerah sendiri sehingga pemerintah daerah mempunyai wewenang penuh untuk mengelola dana tersebut. Di lain pihak pemerintah daerah juga mempunyai tanggung jawab yang sangat besar terhadap pengelolaan keuangan yang berasal dari pendapatan asli daerah, karena dana itu berasal dari masyarakat daerah setempat yang berhak untuk mendapatkan kembali dana tersebut dalam bentuk pembangunan yang dilaksanakan di daerahnya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Halim (2001) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah diatur dalam Undang-Undang

No. 33/2004 perubahan UU No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, menyebutkan bahwa sumber-sumber penerimaan daerah dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah adalah dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan dari daerah itu sendiri yang terdiri dari ; (1) hasil pajak daerah, (2) hasil dari retribusi daerah, (3) hasil dari perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, (4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dengan berbagai pos pendapatan sumber dana yang tersedia diharapkan dapat menyangga dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah. Dengan semakin banyak kebutuhan daerah dapat dibiayai oleh PAD maka semakin tinggi pula tingkat kualitas otonomi daerah, juga semakin mandiri dalam bidang keuangan daerah.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Eni dan Iin (2010) hasilnya bahwa secara parsial PDRB berpengaruh signifikan terhadap PAD. Penelitian yang dilakukan oleh Nani Sari, Rahmatia, dan Yunus (2013) hasilnya menunjukkan bahwa PDRB memiliki pengaruh yang dominan terhadap PAD Kabupaten Morowali.

Penelitian yang dilakukan oleh Defi Roja (2014) dengan judul pengaruh belanja langsung dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Nagan Raya dengan hasil belanja langsung

berpengaruh positif tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Nagan Raya.

Tidak stabilnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap target dapat terlihat pada realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pemerintah Kabupaten Kupang dari tahun 2014 sampai pada tahun 2017 lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut :

**Tabel 1.1**  
**Perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kupang Dari**  
**Tahun 2014-2019**

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentasi (%)
1	2014	61.798.200.000	59.620.693.840,59	96,48
2	2015	62.623.121.237	67.270.792.446,37	107,41
3	2016	98.635.973.808	73.214.731.552,25	74,23
4	2017	142.012.329.803,30	119.098.060.635,33	83,86
5	2018	85.244.781.020,12	66.182.995.394,25	77,64
6	2019	87.416.745.768,32	62.047.535.548,64	70,98
7	2020	70.239.542.600,36	65.952.353.499,95	99,33

Sumber : Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2014 sampai 2017

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas, terlihat bahwa pencapaian Pendapatan Asli Daerah antara realisasi dan target menunjukkan bahwa realisasi penerimaan daerah belum terpenuhi, karena setiap tahunnya realisasi lebih kecil dari target, kecuali pada saat tahun 2015 realisasi lebih besar dari target. Hal ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki pencapaian yang kurang baik.

Berdasarkan uraian-urian diatas, maka penulis berminat untuk penelitian dengan mengabil judul, “ANALISIS PENGARUH DOMESTIK REGIONAL

## **BRUTO (PDRB) DAN BELANJA LANGSUNG TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG KUPANG)”**

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas maka perumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah “*ANALISIS PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB) DAN BELANJA LANGSUNG TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG)*”

### **1.3. Persoalan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penelitian ini memiliki persoalan sebagai berikut:

1. Apakah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pemerintah Kabupaten Kupang ?
2. Apakah belanja langsung berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pemerintah Kabupaten Kupang?

### **1.4. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah :



1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pemerintah Kabupaten Kupang.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Belanja Langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Pemerintah Kabupaten Kupang.

#### **1.4.2. Manfaat Penelitian**

##### **a. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini dapat memberikan informasi atau pengetahuan baru kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan dapat bermanfaat sebagai bahan pedoman atau pembandingan untuk penelitian selanjutnya agar dapat menyusun skripsi dengan baik dan benar.

##### **b. Manfaat Praktis**

###### **1. Bagi Peneliti**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan wawasan dalam bidang pemerintah daerah serta meningkatkan kemampuan analisis tentang pengaruh Produk Domestik Regional Bruto dan Belanja Langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar dapat memperdalam ilmu pengetahuan selama masa perkuliahan.

###### **2. Bagi Pemerintah Daerah**

Bagi pemerintah daerah dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran didalam menentukan kebijakan atas pengaruh

Produk Domestik Regional Bruto terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Kupang.